



UMNO dan PAS dalam Persaingan Politik Sekuler-Islam di Malaysia

Adetia Andri*

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

ABSTRACT

This article aims to look at the political competition between the United Malay National Organization (UMNO) and the Se-Malaysia Islamic Party (PAS) in political dynamics in Malaysia. These two parties are the two largest parties in Malaysia which both consider themselves to represent the voices of the Malay-Islamic community. In writing, this article uses historical research methods in four steps: heuristics, criticism, verification, and historiography, using a political approach. This approach is used to view a historical event from a political point of view. While in terms of data collection techniques, this article uses library research to collect sources related to the topics discussed. The results of the study show that, since their inception, UMNO and PAS have experienced differences in their political goals. UMNO prioritizes the Malay side of its political strategy, while PAS makes Islam its main strategy. These two parties are trying to win most ethnic Malay votes as the largest ethnic group in Malaysia. Mutual claims and criticisms continue to be carried out by the two parties. Another result is that competition between UMNO and PAS has implications for political stability in Malaysia. The arrest of political opponents between the two parties is unavoidable, resulting in the erosion of the Malay majority vote in the Malaysian general election.

ARTICLE HISTORY

Submitted 23 July 2022
Revised 13 August 2022
Accepted 29 August 2022

KEYWORDS

Political competition; UMNO; PAS; Malaysia.

CITATION (APA 6th Edition)

Andri, A. (2022). UMNO dan PAS dalam Persaingan Politik Sekuler-Islam di Malaysia. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 3(2), 74-81.

*CORRESPONDANCE AUTHOR

adetiaandri77@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.34007/warisan.v3i2.1631>

PENDAHULUAN

Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagian besar masyarakatnya berasal dari etnik Melayu (Aljunied, 2019). Malaysia merupakan salah satu negara yang mengalami perkembangan pesat dari aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan keagamaan. Seiring dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai tersebut, Malaysia menjadi negara yang semakin diperhitungkan posisinya dalam kancah politik internasional di Asia Tenggara. Hal ini ditandai dengan berakhirnya penjajahan Inggris atas Malaysia pada 31 Agustus 1957 (Andaya & Andaya, 2017).

Dalam aspek politik, Melayu merupakan salah satu etnik yang tidak dapat dipisahkan dari peta perpolitikan Malaysia. Etnik Melayu memiliki jumlah penduduk 22,606,197 juta jiwa atau 68, 88% dari jumlah keseluruhan penduduk Malaysia (Hamid, 2019). Etnik Melayu yang notabene Muslim secara tidak langsung memberikan peluang besar bagi perolehan suara dalam pemilu, meskipun Malaysia bukan negara muslim. Bagi etnik Melayu, Islam bukan hanya agama dan keyakinan yang dianut oleh pemeluknya tetapi Islam juga menjadi landasan identitas mereka (Ponniah, 2000). Selain etnik Melayu, terdapat etnik lain seperti etnik Cina dan India yang juga memeluk Islam. Karena itulah, nuansa Islam begitu kental mewarnai kehidupan terutama dalam aspek perpolitikan di Malaysia (Hefner, 2001).

Sejak menjadi negara merdeka, posisi Islam semakin diperhitungkan dalam sistem politik dan mendapat tempat khusus dalam Konstitusi Malaysia karena "Islam adalah agama federasi". Ini berarti bahwa orang yang memeluk Islam, secara kebiasaan berbahasa Melayu dan mengikuti adat Melayu. Selain itu, Islam juga dijadikan rujukan utama dalam menyelesaikan konflik politik di Malaysia. Hal ini berakar kuat dari adanya peran pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan sehingga menjadi komitmen bagi masyarakat dalam menjalankannya (Olivier, 2020).

Walaupun demikian, pemerintah tetap harus mempertimbangkan keberadaan warga non-Muslim dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu, dalam memutuskan suatu kebijakan utamanya politik, pemerintah harus mampu bertindak adil agar tidak terjadi gesekan atau konflik dalam masyarakat yang diakibatkan ketidakpuasan dari warga non-

Muslim. Tokoh politik Malaysia dituntut untuk mengaktualisasikan gerakan politik Islam dengan tidak mengesampingkan keberadaan masyarakat non-Muslim. Kebijakan politik pemerintah ini dipengaruhi atau didominasi oleh partai politik (Chin, [2021](#)).

Salah satu partai politik yang cukup kuat di Malaysia yaitu *United Malay National Organization* (UMNO). Sebagai partai politik multi-etnik, UMNO selalu melindungi dan memajukan kepentingan politik, sosial, budaya, agama, dan ekonomi Melayu. Tujuan awal UMNO sebagai partai politik adalah untuk menyatukan dan menyalurkan nasionalisme Malaysia, memperoleh kemerdekaan dari Inggris, mempertahankan dominasi politik dan membuat kompromi yang diperlukan dalam koalisi multi-etnik (Abdullah & Noor, [2022](#); Singh, [1998](#)).

UMNO didirikan di Johor pada 11 Mei 1946, dengan Dato' Onn Ja'far sebagai pemimpin pertamanya. Pada masa-masa awal berdirinya, Dato' Onn Ja'far memiliki inisiatif untuk menyatukan orang-orang Melayu Johor dalam gerakan Melayu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk jawaban atas tantangan dan seruan untuk bersatu dengan semua serikat Melayu di tanah Melayu. Orang Melayu Johor terus memberikan dukungan kuat kepada UMNO, bahkan di bawah kepemimpinan Tuanku Abdul Rahman, dukungan kuat yang diberikan orang Melayu kepada UMNO menunjukkan keyakinan kuat masyarakat bahwa UMNO benar-benar merupakan pihak yang membela bangsa Melayu dan Islam (Ahmad, [2006](#)).

Pendirian UMNO dilatarbelakangi oleh penolakan etnik Melayu terhadap rencana atau keinginan Inggris untuk membentuk *Malaya Union* (Uni Malaya), menggantikan *British Malaya* setelah perang dunia ke-II berakhir. Sebagai negara merdeka, wilayah *Malaya Union* terdiri dari gabungan negeri-negeri Melayu bersekutu (Johor, Trengganu, Kelantan, Kedah, Perlis) dan Negeri-Negeri Selat (Penang dan Malaka). Sedangkan wilayah Singapura berdiri sendiri dan tetap di bawah kontrol Inggris (Lau, [1989](#); Stenson, [1969](#)). Terdapat tiga tujuan pembentukan UMNO, yaitu: (1) mengintegrasikan etnik Tionghoa dan India dalam persamaan politik melalui hukum-hukum kewarganegaraan yang liberal; (2) mewujudkan suatu sistem politik dan pemerintahan yang tunggal dan terpusat; (3) menyiapkan kondisi untuk pada akhirnya etnik Melayu dapat mengatur diri mereka sendiri (Gomez et al., [2007](#)).

Selain UMNO, muncul Partai Islam Se-Malaysia (PAS) sebagai partai politik berhaluan Islam yang juga berusaha untuk menegakkan Islam sebagai dasar utama dari negara Malaysia (Milner, [2008](#)). Partai Islam Se-Malaysia (PAS) lahir pada tanggal 23 Agustus 1951 di Kelab Melayu Banda Butterworth seberang Prai. Kelahiran partai ini dipelopori oleh beberapa ulama dari *United Malay National Organization* (UMNO), yang awalnya hanya berbentuk organisasi kemasyarakatan bagi perkumpulan orang-orang Melayu. Namun pada pertengahan 1984, organisasi ini mengubah haluan ke wilayah politik. PAS dibangun di atas kehancuran partai *Hizbul Muslimin* (HAMIM), yaitu partai politik Islam Pertama dan satu-satunya pada waktu kolonial Inggris berada di kawasan Malaysia. Sebagai sebuah partai Islam pertama di Malaysia, Hizbul Muslimin yang dipimpin oleh Ustaz Abu Bakar al Baqir memiliki tujuan untuk mencapai kemerdekaan negara yang berdaulat untuk membentuk sebuah masyarakat yang berbasis kepada pemahaman Islam serta mewujudkan sebuah negara Islam atau *Darul Islam* (Hamid, [2000](#)).

Namun, riwayat hidup Hizbul Muslimin berakhir pada Agustus 1948 ketika Inggris bertindak mengharamkannya di samping menahan sebanyak tujuh orang pucuk pimpinannya, termasuk Ustaz Abu Bakar al Baqir sendiri di bawah Undang-Undang Darurat (*Emergency Regulations*). Meskipun kegiatan Hizbul Muslimin terhenti, namun antusiasme dukungan rakyat khususnya dari alim ulama terhadap perjuangan politiknya amatlah mengesankan. Semangat dan dukungan amal kental ilmiah inilah yang akhirnya merintis jalan mudah menuju pembentukan PAS pada tahun 1951 (Sundaram & Cheek, [1988](#)).

Gerakan politik Islam yang berkembang di Malaysia tampak dengan jelas didominasi oleh etnik Melayu yang notabene beragama Islam. Dalam perkembangan berikutnya, aspirasi umat Islam pun menjadi bagian dari gerakan politik tersebut. Karena sesungguhnya gerakan politik yang dilakukan oleh UMNO (*United Malay National Organization*) dan PAS (*Partai Islam se-Malaysia*), saling membutuhkan dengan umat Islam yang diwakili oleh etnik Melayu. Dengan realitas yang demikian, maka aspirasi umat Islam dalam gerakan politik yang ada di Malaysia juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan (Kahn & Wah, [1992](#)). Aktualisasi dari gerakan politik Islam yang ada di Malaysia bisa dilihat dengan perkembangan budaya Islam yang begitu pesat, mulai dari perkembangan dakwah, pendidikan Islam, hingga kebijakan politik dan ekonomi yang banyak menguntungkan umat Islam dan etnik Melayu (Daulay, [2013](#)).

Penelitian tentang politik Malaysia sesungguhnya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Di antaranya, Abdullah, dalam analisisnya turut menilai hubungan antara Islam dan etnik dalam perkembangan politik Melayu. Beliau membagi penelitiannya kepada delapan bagian utama yang fokus kepada dinamika hubungan dan perubahan kerja sama politik Melayu-Islam di Malaysia (Abdullah, [2003](#)). Penelitian lainnya dilakukan oleh Badaruddin,

dalam penelitian ia banyak menguraikan bagaimana potret politik yang terjadi di Malaysia, khususnya dominannya pengaruh Islam dan etnis Melayu (Badaruddin, [2008](#)). Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan Anwar, yang banyak menguraikan hubungan dakwah dan politik di Malaysia (Anwar, [1994](#)). Penelitian berikutnya dilakukan oleh Hussin, dalam penelitian ini ia banyak menjelaskan sumber-sumber konflik politik yang terjadi di Malaysia, khususnya sesama etnis Melayu yang terkotak-kotak pada berbagai partai politik (Mutholib, [1993](#)). Walaupun sama-sama meneliti politik di Malaysia, artikel yang penulis sajikan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan para peneliti terdahulu. Karena fokus utama dalam tulisan ini adalah menguraikan persaingan antara UMNO dan PAS sebagai dua partai besar di Malaysia dalam memperjuangkan dasar perjuangannya masing-masing, serta implikasinya terhadap kehidupan perpolitikan di Malaysia. Partai UMNO hadir dengan sifat sekulernya, sementara PAS dengan prinsip Islamnya.

METODE

Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah di dalam penulisannya. Menurut Abdurahman, metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan (Abdurrahman, [1999](#)). Sementara menurut Kuntowijoyo, terdapat lima tahapan dalam penelitian sejarah, yaitu: pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, [2013](#)). Teknik pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) terhadap sumber-sumber yang relevan dengan topik yang diangkat. Teknik ini digunakan sebagai langkah dalam pengumpulan sumber pustaka, membaca, mencatat, dan menganalisis sumber-sumber yang sudah diperoleh. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan politik. Pendekatan ini berguna untuk melihat sebuah peristiwa sejarah dari sudut pandang politik. Dalam hal ini adalah sejarah persaingan antara partai UMNO dan PAS dalam persaingan politik di Malaysia. Fokus utama artikel ini ialah melihat bagaimana persaingan antara UMNO dan PAS, serta implikasinya terhadap kehidupan perpolitikan di Malaysia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persaingan Politik antara UMNO dan PAS

UMNO adalah partai etnis Melayu dan merupakan kekuatan politik dominan di Malaysia yang multietnik. UMNO selalu melindungi dan mempromosikan kepentingan-kepentingan politik, sosial, budaya, agama, dan ekonomi Melayu. Tujuan awalnya sebagai sebuah partai politik sekuler yang dipimpin oleh aristokrat ter-Barat-kan, diarahkan untuk menyatukan dan menyalurkan nasionalisme Malaysia, memperoleh kemerdekaan dari Inggris, dan menjaga dominasi politik dan membuat kompromi yang diperlukan dalam suatu koalisi multietnik.

Suasana politik kebangsaan yang telah berubah sejak zaman Tun Razak dengan kebangkitan golongan pemuda yang dinamis telah menggugat sistem lama yang ada di tubuh UMNO. Dato' Musa Hitam yang menjabat Timbalan Presiden UMNO dan Timbalan Perdana Menteri telah menyuarakan pendiriannya agar pemimpin lama memberi peluang kepada pemimpin baru. Seruan yang dibuat oleh Musa Hitam tersebut serta-merta mendapat sambutan. Pilihan Raya 1995, UMNO juga berhasil menunjukkan kejayaan lewat kerja sama dalam Barisan Nasional. Ini menunjukkan kesadaran yang tinggi dari orang Melayu untuk memberi kepercayaan pada UMNO, bukan kepada Semangat 46 ataupun PAS yang juga partai orang Melayu. Dukungan kuat yang diberikan orang Melayu kepada UMNO menunjukkan kepercayaan kuat masyarakat, bahwa UMNO benar-benar menjadi partai pembela bangsa Melayu dan Islam (Hamid, [1996](#)).

Kebangkitan Islam global yang melanda seluruh Malaysia terjadi bersamaan dengan tampilnya tipe kepemimpinan baru di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohammad ke tampuk kekuasaan di dalam tubuh UMNO pada 1981. Kepemimpinan yang non aristokratis, memperoleh pendidikan lokal, dan bersikap agak anti-Barat, serta lebih dapat diterima dibandingkan kepemimpinan sebelumnya dengan memadukan Islam dan politik dalam suatu latar belakang masyarakat yang multietnik dan multiagama. Proses Islamisasi juga terbukti berlangsung dengan berdirinya sejumlah institusi baru, seperti Bank Islam Malaysia, yang disusul oleh perusahaan asuransi Islam dan pegadaian Islam, Universitas Islam Internasional, Yayasan Pembangunan Islam Malaysia, dan Akademi Pelatihan Guru Islam.

Lebih dari itu, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan status *qāḍi* (hakim agama) dan pengadilan syariat hingga setingkat magistrat dan pengadilan sipil. Langkah-langkah yang dilakukan oleh UMNO untuk memperbaiki nasib orang Melayu (Islam) tidak sepenuhnya berhasil. Hal ini kemudian memunculkan sisi kekecewaan dari anggota lainnya yang menuntut akan perubahan yang lebih radikal dari hal tersebut. Mereka yang kecewa terhadap hasil yang

didapatkan UMNO kemudian membuat sebuah partai politik baru yang menjadikan Islam sebagai asas utamanya (Freedman, [2009](#)).

Partai Politik Islam se-Malaysia (PAS) telah mengalami sejarah panjang dalam panggung politik Malaysia. PAS sejak awal berdirinya hingga kini telah mengalami beberapa kali pergeseran strategi politik (Ismail, [2008](#)). Sebelum Inggris memberi kemerdekaan kepada Malaysia pada 31 Agustus 1957, PAS justru sudah berdiri. Pergeseran strategi politik terus dilakukan PAS seiring dengan dinamika politik yang ada. Pergeseran strategi politik yang dilakukan PAS tersebut mulai dari menjadi bagian (koalisi) dari partai penguasa (UMNO) sebagai sayap ulama UMNO ketika didirikan pada tahun 1946. Namun, karena adanya konflik internal, sayap ulama tersebut keluar dari UMNO pada tahun 1951, dan selanjutnya secara resmi pada tahun 1955 menjadi Partai Islam se-Malaysia (PAS). Namun dalam perkembangan berikutnya, karena kebutuhan politik pragmatis, PAS berkoalisi lagi dengan UMNO/BN pada tahun 1973. Selanjutnya pada tahun 1977, tatkala muncul konflik politik internal di Barisan Nasional, PAS keluar lagi dari koalisi tersebut. Akibat kekalahan PAS bersaing dengan UMNO di Kelantan, muncul krisis politik di internal PAS sehingga melahirkan partai sempalan (*Partai Berjasa*) pada tahun 1978 (Jan, [2017](#)).

Konflik politik di internal PAS ternyata masih terus berlanjut pada tahun 1982 dengan munculnya persaingan antara kelompok tua dengan kelompok muda, yang mengakibatkan tergesernya Dato' Asri Haji Muda dari pucuk pemimpin PAS. Akibat konflik tersebut muncul partai sempalan baru yang bernama *Hizbul Muslimin* di bawah pimpinan Dato' Asri Haji Muda. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan politik di Malaysia, pada tahun 1989, PAS berkoalisi lagi dengan partai sempalan UMNO (Semangat 46) di bawah pimpinan Tengku Razaleigh. Namun koalisi PAS dengan Semangat 46 tidak sepenuhnya disetujui tokoh-tokoh PAS, sehingga mereka keluar dari PAS dan mendirikan partai baru yang diberi nama *Partai Islah* (Yaakub, Azzis, Nizah, Bakar, & Ibrahim, [2016](#)). Koalisi dua partai ini (PAS dan Semangat 46) tidak bertahan lama, karena pada tahun 1990, Tengku Razaleigh kembali bergabung dengan UMNO. Dalam perkembangan berikutnya, PAS terus melakukan gerakan politik yang dinamis dan menjalin koalisi politik dengan PKR dan DAP pada PRU tahun 2008.

Demikian pula dari segi garis perjuangan partai yang mengutamakan semangat nasionalisme bangsa Melayu hingga perjuangan keras untuk mendirikan sebuah negara Islam. Selanjutnya dari aspek budaya pun, PAS pada awalnya identik dengan pakaian sorban dan jenggot, berubah menjadi pakaian Melayu yang lengkap dengan memakai peci. Citra PAS yang awalnya identik dengan partai kampung, fanatik dan kurang terdidik, kini banyak aktivis PAS yang berasal dari kalangan terdidik, lulusan Perguruan Tinggi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sebagaimana lazimnya partai politik, PAS pun tidak bisa lepas dari praktek politik yang pragmatis. Idealisme yang mereka perjuangkan selama ini untuk mendirikan negara Islam dengan menjalankan syariah yang berlandaskan al-Qur'an dan sunnah, ternyata tidak konsisten. Dalam realitasnya, PAS bisa menjalin kerja sama dengan partai lain yang jelas-jelas bukan partai Islam, seperti PKR dan DAP. Ketika PRU Maret 2008, justru koalisi PAS, PKR dan DAP berhasil meraih dukungan yang luar biasa, sehingga bisa menggoyahkan dominasi UMNO/BN. Koalisi tiga partai ini bisa meraih 82 kursi parlemen tingkat nasional dari 222 kursi yang ada. Rinciannya adalah 31 kursi untuk PKR, 28 kursi untuk DAP, dan 23 kursi untuk PAS. Padahal selama ini UMNO/BN selalu meraih kemenangan mayoritas lebih dari 2/3 kursi parlemen. Dalam PRU 2008, UMNO/BN hanya berhasil meraih 140 kursi parlemen tingkat nasional (Badaruddin, [2008](#)).

Dukungan politik yang diperoleh PAS/oposisi selama ini memang belum pernah berhasil mengalahkan UMNO/BN. Namun demikian dukungan politik yang diberikan masyarakat kepada PAS/oposisi mengalami pasang surut. Perolehan dukungan yang cukup kuat diraih PAS/oposisi adalah pada PRU 2008 dengan berhasil mendapat 82 kursi (36,90%) dari 222 kursi yang ada. Selain itu, PAS/oposisi juga meraih kursi parlemen lebih 25%, yaitu pada PRU 1959, meraih 30 kursi (28,85%) dari 104 kursi yang ada, PRU 1969, meraih 49 kursi (34,00%) dari 144 kursi yang ada, PRU 1990, meraih 53 kursi (29,45%) dari 180 kursi yang ada. Dalam perkembangan berikutnya seiring dengan arus modernisasi, PAS juga membuat strategi politik yang lebih modern dengan menjadikan partai ini sebagai partai terbuka dan konsep negara kebajikan.

Konsep *negara kebajikan* yang dipopulerkan oleh PAS sebagai ganti konsep negara Islam juga banyak membantu dalam mengubah persepsi masyarakat kepada PAS. Suasana ini telah dijelaskan oleh Hadi Awang pada muktamar tahunan PAS tahun 2007, dengan menyebut bahwa pekerjaan yang lahir secara *rasuah* adalah mustahil dapat mengatasi masalah *rasuah* dan membina negara berkeadilan. Apabila menghadapi masalah ekonomi, caranya ialah menaikkan cukai atau menaikkan harga barang.

PAS sebenarnya sudah meletakkan Islam sebagai dasar perjuangan, namun sebenarnya PAS sebagai gerakan Islam baru benar-benar lahir pada tahun 1983, yaitu selepas ideologi pemikiran Sayyid Qutb benar-benar mendasari perjuangan PAS. Ketika PAS di bawah kepemimpinan non ulama, PAS tidak lebih dari sebuah partai politik yang hanya

mempunyai nama Islam, namun tidak berbeda dengan UMNO dari segi pembawaan dan pelaksanaan dasar. Bahkan dalam banyak aspek, UMNO justru lebih banyak mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan politiknya, walaupun secara formal ia tidak menyebut dirinya sebagai partai Islam. Sejarah selanjutnya menyaksikan bahwa proses pembersihan perjuangan politik PAS membutuhkan masa yang begitu panjang.

Strategi politik PAS dalam menghadapi UMNO, sering membawa isu Islam sejati, dengan klaim bahwa PAS merupakan partai politik yang memperjuangkan Islam sejati. Perjuangan politik Islam yang dilakukan PAS adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai negara Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Perjuangan politik Islam PAS bukanlah sekadar permainan politik pragmatis yang mencari keuntungan sesaat, melainkan murni untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Bahkan PAS sering menuduh UMNO sebagai partai yang menggunakan Islam sekadar legitimasi politik untuk mempengaruhi massa Melayu. Kebijakan politik PAS terkait dengan penegakan nilai-nilai Islam dinilai oleh banyak pihak justru lebih banyak pada wacana dan permainan retorika. Dalam praktiknya justru lebih konkret perjuangan yang dilakukan UMNO dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Islam. UMNO memang tidak menyebut dirinya sebagai partai Islam, namun justru UMNO memiliki komitmen yang kuat dalam perjuangan politik Islam (Ibrahim, [1987](#)).

Sejak pertengahan 1981, ketika Mahathir Mohammad menjadi Perdana Menteri, pemerintahan pimpinan UMNO berupaya mempertahankan kebangkitan tersebut dengan program islamisasinya dan secara serentak mempertahankan kepemimpinan langsung dan kontrol atas urusan-urusan keislaman, yang dapat dilihat dari sejumlah tindakan yang ditempuhnya. Pada 1982 mereka mengambil hati dengan mengooptasi Anwar Ibrahim, pemimpin Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) yang karismatik, organisasi fundamentalis politis yang terpenting di negeri itu. Pada periode ini banyak kebijakan politik yang menguntungkan umat Islam.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Mahathir telah memperbaiki mandat UMNO sebagai partai Islam dan membantu UMNO dalam pemilihan umum untuk menempatkan pesaingnya PAS "di luar Islam". Namun, belum jelas apakah islamisasi ekstensif yang telah berjalan sejauh itu mengurangi ketetapan hati kelompok-kelompok fundamentalis untuk mengubah konstitusi sehingga memungkinkan pemberlakuan hukum dan administrasi Islam secara federal. Apabila UMNO merasa bahwa melakukan islamisasi lebih lanjut merupakan suatu keharusan, maka hal ini akan melahirkan persoalan-persoalan sebagai Negara yang plural baik dari aspek etnis dan agama.

Sejak awal berdirinya hingga saat ini persaingan sengit antara UMNO dan PAS telah mendominasi politik Malaysia, terutama dalam memperebutkan massa Melayu dengan isu keislaman. Model persaingan politik di Malaysia lebih sesuai dengan teori yang disebut Deborah Norden, dengan model persaingan politik yang *combative* dan *competitive*. Persaingan politik antara UMNO dan PAS tidak memakai model *collusive*, yang menurut Deborah Norden, dalam model *collusive* ini ada kolusi antara partai yang bersaing untuk menjaga kepentingan elite politik, namun di sisi lain membohongi massa pemilih. Sedangkan persaingan dengan model *competitive*, menunjukkan kedua partai bersaing dengan program-program partai yang disusun sedemikian rupa, dan bahkan dengan ideologi yang berbeda. Lewat program partai tersebut ditawarkan kepada masyarakat agar partai mereka dipilih oleh rakyat (Mohammad, [2002](#)).

Namun selain dengan model persaingan *competitive*, UMNO dan PAS juga memakai model *combative*, dengan persaingan yang begitu keras, dan bahkan cenderung menjelek-jelekkan lawan demi untuk meraih kemenangan. Persaingan politik antara UMNO dan PAS terkadang sangat kasar dan tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai kejujuran. Bahkan dalam persaingan politik tersebut sering muncul kebohongan dan fitnah yang bertujuan untuk merusak citra lawan politik.

Citra UMNO sebagai partai sekuler semakin menonjol tatkala Dato' Musa Hitam menjadi timbalan Perdana Menteri. Kebijakan politik yang dibuat pemerintah waktu itu belum begitu kuat berpihak pada kepentingan umat Islam dan Melayu. Namun, pergeseran politik UMNO terus muncul seiring dengan kuatnya tuntutan masyarakat Melayu dan Islam, sehingga UMNO yang dulunya dikenal sekuler bergeser menjadi partai yang banyak membuat kebijakan politik yang menguntungkan Islam. Kebijakan politik yang dibuat Mahathir Mohammad dan juga Abdullah Ahmad Badawi semakin Islami, sehingga membuat PAS yang selama ini mengusung isu Islam merasa tersaingi. UMNO lewat Abdullah Ahmad Badawi dengan cerdas membawa wacana *Islam Hadhari* yang moderat dan bisa diterima oleh sebagian besar umat Islam Malaysia.

Sepanjang 1990-an perdebatan politik tentang Islam banyak menyentuh aspek nilai dan pelaksanaan Islam itu sendiri dan diselaraskan pula dengan cita-cita Mahathir Mohammad untuk memodernkan masyarakat Malaysia melalui dasar perindustrian yang dikenalkan. Bagi Mahathir Mohammad, umat Islam harus banyak melakukan *ijtihad* untuk mengikuti kemajuan zaman. Kalau umat Islam ingin maju dalam semua aspek kehidupan, maka konsep Islam tradisional yang diusung PAS selama ini tidak relevan lagi.

Implikasi Persaingan Politik Antara UMNO dan PAS

Persaingan antara UMNO dan PAS dalam mencari dukungan dan legitimasi Melayu juga berdampak dengan konstitusi Malaysia kontemporer dan etos keislaman Malaysia yang kuat. PAS sendiri mempunyai tujuan yaitu menjadikan Malaysia menjadi negara Islam dan menjalankan syariat Islam di dalamnya. Sedangkan UMNO, adalah partai Melayu yang cenderung pada ideologi nasionalisme dan Melayu, di mana memiliki sifat akomodatif dengan partai non-Melayu seperti etnik Tionghoa dan India. Pada masa awalnya UMNO masih kental dengan sistem sekulernya dan belum menonjolkan keislaman dalam bernegara. UMNO pada perkembangan nantinya mempunyai peran besar dalam penerapan aturan agama dalam masyarakat Malaysia kontemporer.

PAS sendiri sejatinya merupakan pecahan dari UMNO, PAS didirikan oleh ulama-ulama yang tidak satu visi misi lagi dengan UMNO. Mereka merasa UMNO tidak mempunyai komitmen yang kuat terhadap mengimplementasi nilai keislaman, oleh karena itu mereka mendirikan partai oposisi yang berkomitmen untuk mengimplementasikan nilai keislaman dalam negara yakni PAS. Setelah berdiri dan ikut serta dalam pemilu pertama Malaysia sejak tahun 1955, PAS sudah mendapat dukungan dari masyarakat pedesaan dan ulama-ulama konservatif (Helmiati, [2014](#)).

Dengan demikian, bila UMNO lahir untuk menentang Uni Malaya yang dibuat oleh kolonial Inggris dalam suksesi persemakmuran Britania Raya, PAS hadir sebagai oposisi sekaligus mengisi ideologi yang tidak diprioritaskan UMNO yakni hak dan nilai keislaman dalam negara. Funston melihat UMNO sebagai sebuah partai yang tidak jauh dari hakikat sebelumnya yakni partai yang ditujukan memperjuangkan nasionalisme Melayu, UMNO belum mempunyai ideologi yang jelas karena masih banyak memberikan peluang juga kepada non-Melayu seperti berkompromi dengan partai etnik Tamil dan Tionghoa. UMNO terlihat bekerja untuk kepentingan pemerintahan ketimbang mementingkan suatu ideologi praktis, mereka lebih fokus pada perdagangan bebas dan dunia Barat (Funston, [1980](#)).

Oleh karena itu, PAS sebagai oposisi kerap mengkritik UMNO yang *westernisasi* dan sekulerkan Malaysia dengan kebijakan mereka. Sehingga lewat sekelumit hubungan PAS–UMNO ini, dapat diambil kesimpulan bahwa PAS memiliki ideologi yang jelas dalam politiknya yakni keislaman, sedangkan UMNO masih berkuat dalam politik pragmatis yang cenderung sekuler dan hanya berdasar pada dasar perjuangan awal mereka yakni nasionalisme.

Berbagai macam kritikan mulai dilancarkan PAS kepada UMNO. PAS mulai mengorbankan semangat warga Melayu dalam menjalankan ajaran Islam dalam aspek bermasyarakat dan negara. Kebangkitan Islam di Malaysia sebagaimana yang telah dijelaskan mulai berlangsung pada tahun 1970-an dan 1980-an. Zianah Anwar salah satu wartawan senior dan pemerhati kebangkitan Islam di Malaysia era 70/80-an, melihat posisi politis UMNO di pemerintahan pada dua dekade ini terancam dengan giatnya gerakan-gerakan dakwah di masyarakat Melayu, disertai tuntutan kepada pemerintah dari hal yang bersifat lunak hingga radikal. Ditambah PAS sendiri dipimpin oleh orang-orang yang bergaya Hizbul, sehingga sangat menuntut pembentukan negara Islam. Melihat pergolakan politis ini, tidak ada cara lain bagi pemerintah Malaysia selain mendengar dan menanggapi hal-hal ini dengan kebijakan-kebijakan yang pro-Islam.

Mengantisipasi larinya suara Melayu-Muslim kepada PAS, tidak ada cara lain bagi pemerintah Malaysia (UMNO; dikarenakan partai penguasa), kecuali segera membuat kebijakan-kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan Muslim. Hal ini sebagai bentuk antisipasi UMNO karena takut dicap tidak religius oleh masyarakat Melayu-Muslim. Oleh karenanya dimulai kebijakan-kebijakan pemerintah untuk merombak sendi-sendi pemerintahan dari aspek hukum, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.

Namun demikian, jika dilihat lebih mendalam, tindakan pemerintah-UMNO hanya lah sebuah tindakan politis, hal ini dikarenakan dalam praktiknya masih dipenuhi dengan kewaspadaan dan mendua dalam menjalankan ajaran Islam secara utuh dalam bernegara. Karena dalam beberapa kasus, penceramah atau gerakan dakwah banyak yang ditangkap oleh pemerintah karena dianggap sebagai ancaman, sehingga pemerintah Malaysia membuat kebijakan keamanan yakni ISA (*Internal Security Act*), yang bertujuan untuk mengantisipasi dan meredam kegiatan keislaman yang dinilai radikal oleh pemerintah. Kegiatan dakwah ataupun kegiatan keislaman lainnya hanya boleh diselenggarakan oleh pihak atau institusi yang telah mendapat sertifikat atau hak izin dari pemerintah Malaysia (Helmiati, [2014](#)). Namun walau masih terkesan belum mendapat dukungan dan pelaksanaan sepenuhnya oleh pemerintah, setidaknya warga Malaysia adanya perubahan dalam geliat dakwah dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara.

SIMPULAN

Persaingan politik di antara dua partai politik besar di Malaysia UMNO dan PAS mewarnai dinamika politik dalam perjalanan negara Malaysia. Perjalanan panjang yang dilalui kedua partai ini membawa pada penafsiran akan sistem

politik Islam yang berbeda. Meskipun demikian, kontribusi atau peranan kedua partai ini di kancah perpolitikan Malaysia perlu diapresiasi. PAS sebagai partai politik Islam Malaysia menuntut UMNO untuk lebih serius dalam menegakkan syariat Islam. Konflik yang terjadi antara UMNO dan PAS adalah perihal penerapan Islam dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan. UMNO menilai bahwa Islam bisa saja diterapkan dengan melaksanakan prinsip-prinsipnya. Namun PAS menganggap bahwa dibutuhkan sebuah peraturan perundang-undangan yang bisa mengakomodir kebutuhan untuk menerapkan syariat Islam di Malaysia. Konflik tersebut bisa dimaknai dalam dua sudut pandang. Pertama, agama Islam di begitu menancap kuat dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Hal ini tentu mampu memuluskan laju penyebaran Islam dan penyempurnaan agama Islam secara masif.

REFERENSI

- Abdullah, A. R., & Noor, M. N. M. (2022). UMNO dan Politik Identiti Pasca PRU-14, 2018-2022. *Jurnal Wacana Sarjana*, 6(4).
- Abdullah, K. (2003). *The Politics of Islam in Contemporary Malaysia*. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Abdurrahman, D. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ahmad, H. (2006). *Ke arah kelahiran Melayu Glokal*. Selangor: Alaf 21.
- Aljunied, K. (2019). *Islam in Malaysia: An Entwined History*. New York: Oxford University Press.
- Andaya, B. W., & Andaya, L. Y. (2017). *A History of Malaysia* (3 rd editi). Palgrave: Macmillan Publishers.
- Anwar, Z. (1994). *Kebangkitan Islam di Malaysia*. Jakarta: LP3ES.
- Badaruddin, S. (2008). *Demokrasi dan Proses Politik di Malaysia*. Kuala Lumpur: University Malaya.
- Chin, J. (2021). Malaysia: Identity Politics, the Rise of Political Islam and Ketuanan Melayu Islam. In M. Mathews & M. Tay (Eds.), *Religion & Identity Politics: Global Trends And Local Realities*. Singapore: Institute of Policy Studies (IPS).
- Daulay, H. (2013). Persaingan Strategi Politik UMNO dan PAS di Malaysia (Dari Wacana Syariat Islam Hingga Konsep Islam Hadhari). *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 47(1).
- Freedman, A. L. (2009). *Political Viability, Contestation and Power: Islam and Politics in Indonesia and Malaysia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Funston, J. (1980). *Malay Politics in Malaysia, A Study of UMNO & PAS*. Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd.
- Gomez, E. T., Khalid, K. Md., Tong, L. C., López, C., Mohamad, M., & Ting, H. (2007). *Politics in Malaysia The Malay Dimension* (E. T. Gomez, Ed.). New York: Routledge.
- Hamid, A. B. (1996). *UMNO Johor Memartabatkan Bangsa Melayu*. Kuala Lumpur: Berita Publishing.
- Hamid, A. F. A. (2000). Political Dimensions of Religious Conflict in Malaysia: State Response to an Islamic Movement. *Indonesia and the Malay World*, 3(1), 32–65.
- Hamid, M. A. A. (2019). Hak-Hak Keistimewaan Kaum Melayu di Malaysia: Analisis Berdasarkan Perspektif Islam. In K. A. bin Meerangani, A. F. bin Ibrahim, N. A. bin M. Noh, & M. H. bin M. Johar (Eds.), *Kolokium Penyelidikan Siswazah 2019 (KOPSIS '19)*. Melaka: Kolej Universiti Islam Melaka.
- Hefner, R. W. (2001). Multiculturalism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia. In Ro. W. Hefner (Ed.), *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Helmiati. (2014). *Sejarah Islam Asia Tenggara*. Pekanbaru: LPPM Universitas Riau.
- Ibrahim, A. (1987). *Islam and The Constitution*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.
- Ismail, A. R. H. (2008). *Nasionalisme dan Revolusi di Malaysia Pengamatan Sejarah*. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.
- Jan, W. S. W. (2017). *Evolusi Islamisme dalam Politik Malaysia: Pecahnya Partai Islam Malaysia dan Penyebaran Gagasan Progresif*. Singapore: ISEAS-Yusof Institute.
- Kahn, J. S., & Wah, F. L. K. (1992). *Fragmented Vision Culture and Politics in Contemporary Malaysia*. Sidney: Allen & Unwin Pty Ltd.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lau, A. (1989). Malayan Union Citizenship: Constitutional Change and Controversy in Malaya, 1942–48. *Journal of Southeast Asian Studies*, 20(2), 216–243. <https://doi.org/10.1017/S0022463400018105>
- Milner, A. (2008). *The Malay* (1 st editi). London: John Wiley & Sons Ltd.
- Mohammad, M. (2002). *Interaction-Integration*. Kuala Lumpur: Intisari.
- Mutholib, H. (1993). *Islam In Malaysia: from Revivalism to Islamic State*. Singapore: Singapore University Press.
- Olivier, B. (2020). *Islamic Revivalism and Politics in Malaysia: Problems in Nation Building*. Singapore: Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-0882-0>
- Ponniah, M. (2000). The Situation in Malaysia. *Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies*, 17(1), 31–34. <https://doi.org/10.1177/026537880001700112>
- Singh, H. (1998). Tradition, UMNO and Political Succession in Malaysia. *Third World Quarterly*, 19(2), 241–254. <https://doi.org/10.1080/01436599814442>

- Stenson, M. R. (1969). The Malayan Union and the Historians. *Journal of Southeast Asian History*, 10(2), 344–354. <https://doi.org/10.1017/S0217781100004440>
- Sundaram, J. K., & Cheek, A. S. (1988). The Politics of Malaysia's Islamic Resurgence. *Taylor & Francis*, 10(2), 843–868.
- Yaakub, M. T. bin, Azzis, M. S. A., Nizah, M. A. M., Bakar, A. R. A., & Ibrahim, M. A. (2016). Dinamika Kesepaduan Politik Melayu-Islam: Analisis Hubungan Umno-Pas 2010-2015. *Prosiding Persidangan Pemantapan Citra Kenegaraan 4 (Cosna 4)*. Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris Kampus Sultan Azlan Shah.